

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu inti dari terlaksananya demokrasi modern adalah adanya institusi yang mewadahi aspirasi dan kepentingan serta keterwakilan masyarakat yang disebut dengan partai politik. Partai politik adalah sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Keberadaannya mempengaruhi ragam kebijakan yang dikembangkan. Bisa dikatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan suatu pemerintahan dalam melayani sekaligus mensejahterakan masyarakat adalah kegagalan dan keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsinya. Oleh karenanya, eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi merupakan sebuah keniscayaan.¹

Dalam mengukur keberhasilan demokrasi bisa dilihat dari bagaimana partai politik memasukan agenda-agenda kebijakan publik yang bermanfaat tidak saja bagi konstituen pemilihnya, tetapi bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa. Yang menjadi barometernya adalah, misalnya apakah aspirasi konstituen yang dijanjikan partai politik terwujud dalam implementasinya. Studi Hans-Dieter Klingemann, Richard I. Hofferbert, Ian Budge dalam *Partai, Kebijakan dan*

¹ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.15.

Demokrasi (2000) menunjukkan bahwa di negara-negara maju yang secara ekonomi maupun politik ditandai dengan perhatian serius dari partai untuk mewujudkan janji-janji politik pasca partai tersebut memenangkan sebuah pemilihan (election).² Tetapi perlu disadari juga bahwa ukuran demokratisasi sebuah negara tidak hanya dilihat dari peran partai politik. Selain itu masih banyak parameter yang bisa dijadikan indikator keberhasilan dan kegagalan demokrasi dalam kaitannya dengan partai politik.

Secara historis, gagasan membentuk partai politik dengan segala perangkat fungsionalnya menurut Miriam Budiarto dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, bahwa telah lama dibicarakan di Eropa Barat. Ketika itu muncul sebuah pandangan bahwa rakyat merupakan komponen terpenting dari sistem politik yang ingin dikembangkan. Serta terdapat keinginan yang kuat untuk melahirkan suatu lembaga politik yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dan aspirasi publik. Ide dasar untuk membentuk sebuah lembaga politik sudah menunjukkan indikasinya pada era *Renaissance* dan *Aufklärung*. Ketika kekuasaan raja mulai dibatasi, sesungguhnya keinginan untuk membentuk lembaga politik sudah mulai bermunculan. Apalagi hak pilih bagi rakyat sudah diberikan secara luas.

² Ibid, hlm. 2

Setelah wacana perluasan hak-hak politik bagi rakyat semakin meningkat dengan pesat, partai politik seakan-akan telah lahir dengan sendirinya secara spontan. Apalagi keterlibatan rakyat dalam proses politik pada waktu itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang urgen dan mendesak. Maka, sebagai wujud interaksi antara pemerintah dengan rakyat, dibutuhkan kendaraan politik yang diasumsikan mampu menjaga simbiosis antara keduanya. Dengan demikian perlu sebuah wadah yang dapat menghubungkan antara rakyat dengan pemerintah. Dan wadah atau kendaraan tersebut pada akhirnya bernama partai politik.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, fenomena partai politik adalah fenomena pascakolonialisme. Artinya, kemunculan partai politik yang kita kenal sekarang ini terjadi ketika negara ini memperoleh kemerdekaan. Terlepas dari periode kolonial membuat banyak negara mulai membangun institusi politik di negaranya. Meskipun ruang kebebasan masyarakat untuk mendirikan institusi politik dalam periode kolonial memang dibatasi, tetapi pembentukan serikat-serikat kerap terjadi.³ Pengaruh pemikiran politik dunia terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia sesungguhnya telah dimulai semenjak masa pra kemerdekaan. Pengaruh tersebut dapat dirasakan sejak bangkitnya nasionalisme pada pertengahan tahun 1900-1910, hal ini terbukti dengan lahirnya Boedi

³ Firmansyah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 57

Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh komunitas cendekiawan muda yaitu DR. Soetomo dan teman-temannya sebagai pelopor organisasi kepemudaan.

Sejak berdirinya Boedi Oetomo, dinamika pergerakan nasional berkembang pesat. Namun dalam tahap ini, belum bisa mengkategorikannya sebagai partai seperti dalam definisi formalnya. Akan tetapi seiring pertumbuhannya, perkumpulan tersebut berubah menjadi organisasi massa yang didukung oleh petani dan golongan buruh yang pada mulanya hanya perkumpulan pemuda dan kaum terpelajar. Sehingga aspirasi politik lebih dituangkan ke dalam bentuk-bentuk organisasi yang masih dalam tahap porto-politik. Tentunya bentuk ini sangat penting bagi bangsa dalam merumuskan agenda-agenda dengan tujuan memerdekakan negaranya. Terdapat beragam ide dan gagasan tentang kondisi masyarakat yang ingin diciptakan, kaum nasionalis, sosialis, dan agama masing-masing memiliki agenda, kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda.

Membahas mengenai sejarah partai politik di Indonesia pada pascakemerdekaan, setidaknya bisa dirunutkan pada studi Herbert Feith mengenai pemikiran politik Indonesia pada tahun 1945-1965. Setidaknya ini merupakan studi yang cukup komprehensif dalam melakukan analisis pemikiran politik yang menjadi dasar lahirnya partai-partai politik berbasis ideologi di Indonesia. Karena dalam perkembangannya, inisiatif warga negara membentuk partai politik atas dasar berbagai macam kepentingan yang ingin disalurkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan partai

politik atas dasar ideologi. Ideologi sebagai rumusan gagasan dan cita-cita masyarakat tertentu berkembang seiring dengan berkembangnya manusia itu sendiri. Secara umum Herbert Feith mengkategorikan pemikiran politik di Indonesia pada tahun 1945-1965 dalam lima aliran politik: nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokrat dan komunisme. Sampai saat ini tidak jarang kategori pemikiran politik (ideologi) dalam berbagai bentuk kelompok partai politik sebagaimana dipelajari Herbert Feith masih relevan digunakan.

Bagi negara baru yang institusi politiknya tidak pernah disiapkan oleh penjajah, seperti Indonesia, dunia politiknya semacam laboratorium politik yang penuh dengan uji coba. Sejak berdirinya Indonesia sampai tahun 1965, sistem demokrasi di negeri kita mengalami beberapa kali penyesuaian. Dari sistem demokrasi presidensial, parlemen, sampai demokrasi terpimpin. Apapun sistem demokrasi yang pernah kita miliki, partai politik merupakan pilar utama dalam sistem berpolitik. Partai politik merupakan pemain utama dan resmi dalam sistem demokrasi.

Berdirinya republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. Bentuk negara yang dipilih adalah Negara Kesatuan. Para pendiri bangsa beranggapan bahwa bentuk negara yang paling tepat untuk Indonesia adalah republik presidensial. Mereka tidak percaya bahwa bentuk kerajaan atau

otoritarianisme komunis cukup tepat untuk mengelola Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa. Satu-satunya bentuk Negara yang tepat adalah republik.

Dengan menerapkan sistem demokrasi, para pemimpin pasca kemerdekaan harus memikirkan dilaksanakannya pemilu (pemilihan umum) sebagai cara berdemokrasi. Situasi yang masih dipenuhi perang dengan pihak kolonial yang masih penasaran mempertahankan wilayah jajahannya maupun perang saudara membuat Indonesia tidak dapat segera melaksanakan pemilu setelah mendapatkan kemerdekaannya. Kisruh politik pun masih menyelimuti kalangan elit politik. Para pemimpin sempat memutuskan untuk membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Namun bentuk ini tidak bertahan lama dan akhirnya Indonesia kembali pada bentuk yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa, yaitu Republik Indonesia, atau yang sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah mengalami kisruh politik yang kerap diwarnai dengan pertumpahan darah, baru pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia bisa diselenggarakan. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante (istilah MPR pada saat itu). Dalam pemilu pertama ini muncul 4 nama partai besar yang memiliki perolehan suara diatas 10%, yaitu: PNI (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), dan PKI (16,36%).

Dalam pemilu pertama ini menganut sistem multipartai, karena banyaknya kelompok politik pada masa itu. Seperti partai yang bersifat kedaerahan dan partai

yang berbasis agama. Kelompok yang menginginkan persatuan bangsa tampaknya cukup kuat sehingga kelompok nasionalis (PNI) berhasil memenangkan pemilu pertama.

Pemilu pun tidak pernah dilaksanakan lagi pada era orde lama pimpinan Bung Karno ini. Para anggota legislatif diangkat oleh presiden. Kemudian terlaksana kembali pada era orde baru pimpinan Soeharto pada tahun 1971. Pemilu kedua sejak Indonesia merdeka juga menerapkan sistem multipartai. Namun hanya sepuluh partai yang menjadi peserta dan dianggap layak dalam pemilu kali ini. Akhirnya Golkar yang dibentuk Soeharto memenangkan pemilu dengan merebut 62, 82% suara. PNI yang Berjaya di masa Soekarno hanya menempati urutan ke empat dibawah NU dan Parmusi. Setelah itu, pemerintah bersama DPR berusaha menyederhanakan partai peserta pemilu dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golkar, dengan menganut sistem 'tripartai' untuk pemilu yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 1976. Yang menjadi peserta yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Tetapi pemilu baru bisa terlaksana pada tahun 1977 yang dimenangkan kembali oleh Golkar.

Sistem ini bertahan selama empat kali pemilu, yaitu pemilu pada tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dengan demikian, dalam era orde baru berhasil mempertahankan bentuk tiga partai di Indonesia, setelah melalui 'pemaksaan' penggabungan partai-partai yang berlangsung cukup alot. Jadi di Indonesia era itu terdapat dua partai nasionalis dan satu partai yang berbasis agama.

Setelah Soeharto dijatuhkan dari kursi kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam mekanisme pemilu. *Pertama*, kembalinya sistem multipartai dari sistem 'tripartai'. BJ Habibie yang ketika itu menjadi wakil persiden menduduki kursi presiden dalam era transisi, dibebankan untuk pelaksanaan percepatan pelaksanaan pemilu yang akhirnya disepakati diselenggarakan pada tahun 1999. Dengan disahkannya UU No 2\1999, tercatat sekitar 141 partai yang mendaftarkan diri di Depkumham.⁴ Banyaknya partai politik yang didirikan para tokoh negara ini, kemudian mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu, merupakan salah satu dampak dari tiga puluh dua tahun dikungkung oleh rezim tiran. Syarat yang ditetapkan untuk pembentukan partai politik relatif mudah. Dalam pasal 2 UU No. 2\1999 tersebut mengatur tentang pembentukan partai politik yang intinya, partai politik yang didirikan tidak bertentangan dengan Pancasila serta bersifat terbuka untuk setiap warga negara Indonesia yang telah mempunyai syarat hak pilih.

Syarat-syarat pembentukan partai politik kemudian menjadi berat dengan adanya syarat tambahan yaitu sekurang-kurangnya mempunyai kepengurusan pada lima provinsi dan tiga kabupaten dalam masing-masing provinsi yang dimaksud. Sesudah dilakukan proses verifikasi, yang dinyatakan lolos verifikasi

⁴ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.51.

hanya 48 partai untuk menjadi peserta pemilu 1999. *Kedua*: pada pemilu tahun 2004, pemilu diadakan dua kali; pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif, kedua untuk memilih presiden secara langsung. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung tanpa ada perantara yaitu MPR.

Berakhirnya era orde baru, secara otomatis pentas perpolitikan nasional mengalami perubahan yang cukup berarti. Dunia pers yang awalnya dibelenggu kreativitasnya, kini diberi kebebasan untuk menulis dan menyajikan berita sesuai dengan fakta yang diperoleh. Demikian juga hak warga negara untuk berbicara dan berpendapat yang dulunya dipasung dalam penjara politik selama 32 tahun dibawah kekuasaan otoriter pemerintahan orde baru, kini telah bebas berpendapat dan berserikat. Angin perubahan dan kebebasan yang mengikuti arah reformasi dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk perbaikan sistem pemerintahan yang diharapkan benar-benar aspiratif dan akomodatif.

Tidak ketinggalan dengan warga Nahdatul Ulama (NU) yang anggotanya lebih dari 40 juta untuk mengambil peran kebijakan dalam perubahan ini. '*Kalau saja terjadi rekayasa demokrasi di kemudian hari demi munculnya partai baru, maka NU yang paling siap mendirikan partai politik*', ungkapan ini keluar dari Prof. Dr. William Liddle, pengamat politik dari Ohio University, Amerika

Serikat.⁵ Warga NU di seluruh pelosok tanah air mengusulkan kepada Pengurus Besar NU untuk segera mengumumkan pendirian partai sebagai aspirasi politik warga NU. Segera pada waktu itu PBNU membentuk tim yang bertugas memfasilitasi keinginan besar warga NU itu. Akhirnya, setelah melewati proses yang panjang, partai politik yang diharapkan dapat menampung aspirasi warga NU diberi nama **Partai Kebangkitan Bangsa**, pada 23 juli 1998 di deklarasikan di kediaman K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur Jakarta Selatan.⁶ Pada acara deklarasi itu diumumkan juga struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), dengan susunan; ketua Dewan Syuro: Dr. K. H. Ma'ruf Amin dan Dewan Tanfidzi : Drs. H. Matori Abdul Jalil. Para anggota DPP PKB tersebut dilantik dan disumpah dihadapan ribuan warga NU, para ulama dan tokoh elit NU.

Namun kelahiran PKB tetap bersifat professional, dalam artian lahirnya partai politik yang bernama PKB tidak menyeret-nyeret regulasi NU sebagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. NU hanya mediator dalam mengambil sikap serta menyediakan pangsa pasar dari orang-orang NU dengan tanpa mencampuradukkan keduanya.⁷ Hal ini untuk mengantisipasi terlebih dahulu

⁵ Asmawi, *PKB: Jendela Politik GUS DUR*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 21

⁶ Ibid, hlm. 27

⁷ Imam Nahrawi, *moralitas Politik PKB: Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern*, Averroe Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 21

mengenai posisi NU-PKB nantinya. Sebab, lebih baik menegaskan posisi masing-masing dan prosedur yang selama ini menjadi patokan di tubuh NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan tidak hanya terbatas oleh satu partai saja. NU adalah milik semua warga *Nahdliyin* dan bangsa, bukan hanya PKB.⁸ Partai ini memang bukan hanya satu-satunya partai politik yang dibentuk warga NU. Beberapa partai lainnya yang juga dibentuk menjelang pemilu 1999 adalah Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang didirikan oleh paman Gus Dur, yaitu Yusuf Hasyim; Partai Nahdatul Ummat (PNU) didirikan oleh Syukron Makmun; dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) yang didirikan oleh Abu Hasan, yang seluruhnya dibentuk setelah PKB.⁹

Perjalanan politik PKB sebagai partai yang berusaha untuk tampil terbuka, independen, dan profesional banyak mendapat hambatan, terutama konflik yang terjadi dalam tubuh partai itu sendiri. Sebut saja kasus Matori Abdul Jalil. Konflik itu bermula dari lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan, hal itu tentu saja mengecewakan pihak PKB dan NU sebagai wadah kultural. Pada saat Sidang Istimewa II MPR-RI, seluruh anggota Fraksi PKB melakukan aksi *walk out*, namun Matori yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum PKB dan wakil ketua MPR tidak ikut aksi tersebut. Matori bahkan menghadiri acara pelantikan

⁸ Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, Pustaka Tokoh Indonesia, Yogyakarta, 2005

⁹ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik radikal dan Akomodatif*, LP3S, Jakarta, 2004, hlm. 167

Megawati dan Hamzah Haz sebagai presiden dan wakil presiden RI.¹⁰ Tidak hanya itu, Matori bahkan menerima jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditawarkan oleh Megawati dalam Kabinet Gotong Royong. Langkah yang diambil Gus Dur pada waktu itu selaku Dewan Syuro adalah memecat Matori dari posisinya sebagai ketua umum DPP PKB pada tanggal 21 Juli 2001. Kemudian Gus Dur menunjuk Alwi Shihab, menteri luar negeri pada kabinet pemerintahan Gus Dur sebagai pelaksana tugas ketua DPP PKB.

Namun Matori tidak tinggal diam, ia mengklaim masih merupakan ketua PKB yang sah. Konflik antar elit PKB akhirnya tak bisa dihindari, hingga pada kalangan *grass root*. Berbagai upaya untuk meredam konflik internal telah dilakukan oleh para kiyai PBNU, namun baik Gus Dur maupun Matori tetap pada pendirian masing-masing. Hingga pada akhirnya kubu Gus Dur mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB) di Jogjakarta yang berujung pada pemecatan Matori dari ketua umum DPP PKB dan digantikan oleh Alwi Shihab. Kasus Matori terbilang merupakan awal mula dimulainya pelajaran konflik ditubuh PKB.

Setelah kasus Matori agak mereda, warga PKB dikejutkan dengan langkah Gus Dur yang bermaksud mereposisi Saifullah Yusuf dari jabatan Sekertaris Jendral PKB. Pada akhirnya rapat pleno DPP PKB memutuskan untuk memecat keduanya yaitu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai ketua umum dan

¹⁰ Imam Nahrawi, *moralitas Politik PKB: Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern*, Averro Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 31

sekertaris jendral Dewan Tanfidz DPP PKB. Hal ini dikarenakan keduanya ditunjuk oleh pasangan SBY-JK sebagai Menko Kesra dan Menteri Urusan Percepatan Daerah Tertinggal.¹¹ Kubu Gus Dur mengadakan Muktamar II di Semarang yang memunculkan nama Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB. Tentu saja Alwi-saifullah tidak terima, mereka berdua memilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur pengadilan.

Mulai saat itu kemelut ditubuh PKB makin tidak menentu. Konflik kedua kubu telah melibatkan para kiyai dan pihak-pihak yang berada diluar PKB. Kasus konflik PKB ini menjadi khas NU, sebab telah melibatkan dan juga dilibatkan sejumlah kiyai. Kiyai menjadi kunci, masing-masing mengklaim mendapat dukungan para kiyai.¹² Upaya mediasi atau *ishlah* tetap dilakukan selama menunggu proses hukum tersebut. Proses hukum ini menjadi dasar keabsahan DPP PKB yang mendapat pengakuan resmi dari Negara yang diputuskan oleh MA.

Keberadaan konflik di tubuh PKB memang mudah menyulut klaim-klaim politis serta yuridis dari dua pihak. Oleh karena itu, ketua MA Bagir Manan membantah kalau dikatakan telah mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum soal kepengurusan ganda PKB. Agaknya wajar bagi seorang ketua MA yang berhati-

¹¹ Ibid, hlm. 38

¹² Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik radikal dan Akomodatif*, LP3S, Jakarta, 2004, hlm. xx

hati soal ini, sebab tentu saja dirinya khawatir dianggap mengintervensi terlalu jauh terhadap kasus tersebut. Meskipun fatwa tersebut tidak mengikat karena hanya bersifat pendapat hukum saja, tetapi setidaknya hal tersebut dapat menjadi kekuatan politik tersendiri bagi salah satu kubu karena pendapat tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM.¹³

Sementara itu, dalam kaitannya dengan konflik DPP ganda seperti ini, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin memberikan Surat Keputusan tentang pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan pengurus PKB kepada Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB hasil Muktamar II Semarang. Ini semakin meneguhkan landasan yuridis dan politis DPP PKB versi Muhaimin di mata hukum. Keputusan itu mulai berlaku sejak ditetapkan 8 Juni dengan ketentuan, bila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka akan ditinjau.¹⁴

Setelah berakhirnya konflik antara Gus Dur-Muhaimin dengan Alwi-Saifullah, kini giliran Muhaimin sendiri yang menghadapi Gus Dur. Konflik internal yang berkepanjangan semakin tidak sehat. Gus Dur menghendaki Muhaimin turun dari jabatan ketua Dewan Tanfidz DPP PKB. Namun kali ini Gus Dur mendapatkan perlawanan yang cukup proporsional, tepat dan

¹³ Baca, *Kompas*, edisi 07 Juni 2005

¹⁴ Baca, *Kompas*, edisi 08 Juni 2005

konstitusional. Ketika Gus Dur menyingkirkan Matori dan Alwi Shihab, Gus Dur berada pada posisi aman, yaitu tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Tetapi ketika memecat Muhaimin, justru Gus Dur yang terancam posisinya sebagai ketua Dewan Syuro DPP PKB. Dengan digelarnya Muktamar Luar Biasa di Ancol oleh kubu Muhaimin, maka kali ini Gus Dur yang harus pensiun, karena yang terdaftar sebagai pengurus yang sah di Depkumham adalah PKB kubu Muhaimin.

Sebagai salah satu partai islam yang besar, penulis tertarik untuk menjadikan partai ini sebagai obyek penelitian, sebab dengan melihat konflik internal yang berkepanjangan dan tidak sehat bagi jalannya sebuah partai besar, serta partai tersebut harus fokus pada kompetisi pemilu 2009. Dalam penelitian ini sengaja hanya sebatas mengenai dinamika konflik internal dan bagaimana strategi pemenangan pada pemilu 2009, Karena pasca konflik internal yang rumit dan panjang, konstituen partai tersebut menjadi bingung dengan keadaan partainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumusan permasalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik yang terjadi dalam internal elit politik PKB?
2. Bagaimanakah strategi PKB dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009?

C. Kerangka Teori

Untuk mendalami permasalahan lebih jauh yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori dan konsep yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini, diantaranya:

C. 1. Konflik

Di dalam bahasa aslinya, istilah “conflict” menurut Webster berarti suatu ‘perkelahian, peperangan atau perjuangan’- yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.¹⁵ Namun Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengembangkan bahwa konflik berarti *persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang*

¹⁵ Dean G. Pruitt – Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Pusataka Pelajar, Jogjakarta, 2009, hlm. 9

*berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.*¹⁶ Mereka merasa mampu membangun sebuah teori yang sederhana dengan mencoba menjelaskan asal mula terjadinya perbedaan kepentingan seperti yang dipersepsikan oleh pihak-pihak yang berkonflik dan dampak perbedaan persepsi terhadap pemilihan strategi serta hasilnya. Karena mereka berdua adalah ahli psikologi social, maka teorinya pun dipengaruhi oleh kerangka berpikir psikologi social, yaitu dalam kerangka dampak kondisi mental terhadap perilaku social.

Ada beberapa teori utama mengenai sebab-sebab terjadinya konflik:

a) Teori Hubungan Masyarakat

Menganggap bahwa konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

b) Teori Kebutuhan Manusia

Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi.

¹⁶ Ibid, hlm. 9

c) Teori Negosiasi prinsip

Bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

d) Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan.

e) Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.

f) Teori Transformasi Politik

Bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah social, budaya dan ekonomi.

Berdasarkan teori yang dikembangkan para ahli, konflik itu memiliki kelas, stadium atau mungkin bisa disebut tingkatan. Dalam Encyclopedia of Professional Management (editor: Lester Robert Bittle, Mc Graw-Hill, Inc. 1998) terdapat penjelasan bahwa tingkatan konflik dalam organisasi itu antara lain:

1. Tingkatan pertama adalah *the invisible conflict*. Yaitu konflik yang tak terlihat atau laten yang berada dalam batin kita. Ada beberapa ketidakcocokan antara kita dengan orang lain, tetapi ketidakcocokan itu tidak dimunculkan dalam suatu sikap atau tindakan seseorang.
2. Tingkatan kedua ialah *the perceived / experienced konflik*. Adalah konflik yang nampak atau yang kita alami. Kita dengan orang lain memunculkan perbedaan tersebut, baik itu pendapat, tindakan, motif, kebutuhan dan lain-lain dalam bentuk perlawanan dengan suatu sikap atau tindakan.
3. Tingkatan ketiga adalah *the fighting*. Pada tingkatan ini konflik telah berubah menjadi perlawanan fisik, perkelahian, baku hantam, atau hal-hal semacam itu.

Bahasan yang akan diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah konflik pada level kelembagaan. Dalam konflik kelembagaan, dapat dibagi menjadi dua macam konflik, yaitu pertama, konflik didalam lembaga itu sendiri dan yang kedua adalah konflik antar lembaga, yang bisa melibatkan dua lembaga atau lebih.

Konflik didalam suatu lembaga terjadi hampir sama dengan tingkatan konflik diatas, tetapi sifatnya lebih kompleks. Yang membedakan adalah banyaknya individu yang terlibat dalam konflik. Anggota-anggota dalam suatu lembaga saling

bertentangan karena mempunyai kepentingan yang sama terhadap satu hal dan sama-sama tidak mau mengalah. Mereka mempunyai perbedaan pandangan atau pendapat. Dalam posisinya sebagai anggota kelompok, akan cenderung memilah-milah diri kedalam dua kategori, yaitu *in group* dan *out group*.

Jika kita amati dinamika suatu lembaga, kita bisa menemukan tiga tipe konflik. Yaitu:

- a. Konflik penugasan. Konflik ini terjadi karena perbedaan pendapat dalam hal bagaimana cara menyelesaikan suatu tugas dalam sebuah kelompok.
- b. Konflik emosional. Konflik ini melibatkan hubungan interpersonal antar anggota yang bekerja dalam suatu kelompok. Dalam hal ini emosinegatif, perasaan tidak suka terhadap orang lain menjadi menjadi hal pendukung konflik.
- c. Konflik administratif. Konflik ini terjadi ketika terjadi perbedaan tentang cara merumuskan keputusan kebijakan.

Dalam kaitannya dengan konflik, penulis ingin melihat sejauh mana partai politik dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa yang mengalami konflik internal yang berkepanjangan, bisa bertahan dan bersaing dengan partai lainnya untuk berkompetisi pada pemilu 2009.

C. 2. Partai Politik

Ada banyak pengertian ataupun teori mengenai partai politik. Akan tetapi hingga sekarang belum tersusun suatu teori yang mantap mengenai partai sebagai lembaga politik.¹⁷ Namun banyak ilmuwan yang kemudian melakukan kajian mendalam dalam rangka usaha penyusunan suatu teori yang menyeluruh. Salah satunya adalah R.H. Soltau. Menurut Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaan untuk memilih- bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan mereka.¹⁸ Tidak jauh berbeda dengan Soltau, Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideil maupun materiil.¹⁹

Partai politik dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan dan melakukan kontrol terhadap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Partai politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk

¹⁷ Prof. Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 159

¹⁸ *Ibid*, hlm. 161

¹⁹ *Ibid*, hlm. 161



membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.²⁰ Hal ini tentunya menyiratkan agar tujuan partai politik bisa mengkritisi setiap kebijakan dan tidak tergantung pada pemerintah yang seharusnya dikritisi.

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik,²¹ yaitu:

1. Organisasi jangka panjang. Partai politik harus bersifat jangka panjang meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada system dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi, dan adamekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik dalam waktu lama.
2. Struktur organisasi. Partai politik dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke

²⁰ Firmansyah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 66

²¹ Ibid, hlm. 67

atas maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi control dan koordinasi.

3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level local maupun nasional. Hal inilah yang membedakan antara partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumberlegitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan public yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar pula legitimasi yang diperolehnya.

Dalam UU No. 02/2008 tentang partai politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa pengertian tentang partai politik, dapat disimpulkan bahwa partai politik sangat terkait dengan kekuasaan, berusaha memperoleh kekuasaan dengan cara-cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka dan melakukan beberapa control terhadap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan sekaligus kebijakan yang dibuat.

Dari pengertian partai politik diatas, penting juga untuk mengetahui asal mula lahirnya partai politik. Ada tiga teori mengenai asal mula partai politik yang dikembangkan oleh Joseph La Palombara dan Weiner.²² Yaitu:

1) Teori Kelembagaan

- a) Ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik.
- b) Muncul dua tipe partai politik dalam teori ini: *intraparliamentary* dan *extraparliamentary*
- c) *Intraparliamentary*: partai politik dibentuk oleh legislative (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.

²² Handout mata kuliah Studi Partai Politik

- d) Extraparliamentary: partai ini dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang sadar politik yang menilai bahwa parpol yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka.

2) Teori Situasi Historis

- a) Munculnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Krisis yang dimaksud adalah ketika suatu system politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern dan berstruktur kompleks.
- b) Perubahan itu disebabkan oleh perluasan pendidikan, partisipasi media, perbaikan fasilitas publik, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menimbulkan tiga macam krisis, yaitu krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi.
- c) Untuk mengatasi hal-hal tersebut partai politik kemudian dibentuk dengan harapan dapat mengendalikan dan mengontrol kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga terbentuk pola hubungan kewenangan yang *legitimate* antara pemerintah dengan masyarakat.

3) Teori Pembangunan

- a) Partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. Ini dilihat dari modernisasi social ekonomi seperti teknologi komunikasi berupa

media massa atau transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, dan peningkatan kemampuan individu melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memperjuangkan aspirasi tersebut.

- b) Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori situasi historis, bahwa parpol berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan oleh modernisasi sehingga melahirkan kebutuhan akan adanya partai politik.

Untuk memahami lebih jauh mengenai partai politik, tidak hanya sebatas pengertian dan asal mula atau mengapa partai politik harus didirikan sebagai lembaga yang mengakomodasi kepentingan public. Tetapi harus dipahami juga mengenai peran dan fungsi dari partai politik itu sendiri. Menurut Miriam Budiarjo, ada empat fungsi partai politik, yaitu.²³

1. *Partai sebagai sarana komunikasi politik.*

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat kemudian mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang apabila tidak ditampung, disinilah tugas partai politik untuk mengartikulasikan kepentingan kelompoknya.

²³ Baca Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 163

2. *Partai sebagai sarana sosialisasi politik*

Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui proses pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu, partai berusaha menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui kampanye politik dengan menggunakan seluruh media yang bisa digunakan untuk sosialisasi.

3. *Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.*

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Salah satu caranya ialah dengan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan partai yang lama. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

4. *Partai politik sebagai sarana paengatur konflik (conflict management)*

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berfungsi sebagai media untuk mengatasi konflik tersebut.

Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya informasi yang diberikan justru menimbulkan perpecahan dalam masyarakat ataupun dalam

tubuh partai politik itu sendiri, sehingga yang dikejar bukan kepentingan bersama, melainkan kepentingan partai yang sempit sebagai akibat dari pengkotakan politik atau konflik tidak terselesaikan, malahan dipertajam. Seperti halnya yang terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa. Walaupun konflik dapat diselesaikan dengan proses hukum dan konstitusional, tetapi konflik yang sifatnya laten tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh.

C. 3. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang (-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.²⁴ Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, disebutkan bahwa:

²⁴ Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas

- a) Berdasarkan undang-undang dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat;
- b) Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
- c) Pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Andrew Keynolds, pemilihan umum adalah metode yang digunakan untuk memilih para pembuat keputusan manakala masyarakat punya keinginan besar untuk dapat terlibat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi masyarakat tersebut.

Istilah "sistem pemilihan umum" sudah sering didengar dan dibaca diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Sesungguhnya istilah system pemilihan umum memiliki definisi yang lebih sempit dan ketat. Menurut Benjuino Theodore, "sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya (1) pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan (2) suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Theodore mengisyaratkan bahwa

sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara serta penerjemahan suara menjadi kursi.

Ilmuwan politik Douglas Mc Rae mengatakan bahwa studi tentang sistem pemilu telah berkembang pesat sejak tahun 1989, terutama yang berkaitan dengan konsekuensi politik dari sistem pemilu yang digunakan oleh suatu negara. Sistem politik penting untuk dipelajari karena ada kepentingan-kepentingan politik dibaliknya dalam rangka mengambil keputusan sistem pemilu yang mana yang akan diadopsi untuk menghasilkan demokrasi yang representatif. Disamping fungsinya yang utama, sistem pemilu juga mencerminkan kecerdasan para pemilih, kemampuan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan stabil, kemampuan memilih wakil rakyat, dan sebagainya.

Fungsi utama sistem pemilu adalah untuk menjaga agar warga negara dapat selalu menuntut akuntabilitas dari wakil-wakilnya atau politisi yang dipilih oleh warga Negara untuk mewakili mereka dalam pembuatan keputusan-keputusan politik yang penting. Disamping itu, sistem pemilu juga dapat berfungsi sebagai struktur pembatas diskursus politik yang dapat diterima dengan memberikan insentif bagi para pemimpin politik untuk menampilkan daya tarik mereka dengan cara-cara yang berbeda. Lebih dari itu, sistem pemilu sangat menentukan mengisi sejumlah jabatan politik yang juga mencerminkan kecerdasan para pemilih, kemampuan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan stabil, kemampuan memilih wakil rakyat yang berkualitas dan lain sebagainya.

C.4. Elite Politik

Jumlah penguasa selalu lebih sedikit dibanding dengan yang dikuasai merupakan jawaban awal terhadap pertanyaan fundamental “siapa yang memerintah?” sejak berabad-abad sudah menjadi dalil pemikiran politik bahwa kekuasaan dalam masyarakat didistribusikan tidak merata. Tetapi di Eropa pada abad ke-18 muncul pandangan sebaliknya: bahwa seluruh warga negara – atau paling tidak, semua laki-laki dewasa ikut memiliki kekuasaan secara merata. Ini merupakan awal abad revolusi demokrasi.

Tetapi pada penghujung abad ke-19 optimisme demokratik ini mulai dipertanyakan kembali oleh para pengkaji masyarakat yang berpandangan pesimistik, yang menyatakan bahwa dibalik berbagai bentuk pemerintahan, kekuasaan selalu dipegang oleh sekelompok penguasa yang jumlah anggotanya hanya beberapa orang saja. Seperti dikatakan oleh Gaetano Mosca:

Dalam setiap masyarakat....terdapat dua kelas penduduk. Satu kelas yang menguasai, dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan

*kelas dua, yang jumlahnya jauh lebih besar diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu.*²⁵

Sejak awal perdebatan antara kaum elitis dan penentangannya telah diliputi oleh kekacauan diantara apa yang *sebenarnya* (what is), apa yang *mungkin* (what could be), dan apa yang *sebenarnya terjadi* (what ought to be). Kaum demokrat liberal menyatakan bahwa kekuasaan seharusnya dibagi merata dan ini mungkin untuk dilakukan. Dalam menjawab ini kaum elitis menyatakan bahwa bukan saja karena kenyataannya kekuasaan ini dimonopoli oleh sekelompok kecil orang, tetapi memegang secara praktis tidak mungkin dan tidak seharusnya terjadi yang sebaliknya. Jadi secara ideologis kaum elitis itu nampak semata-mata sebagai pembela konservatif dari tertib politik yang sudah mapan. Sekalipun begitu, tulisan-tulisan mereka mengandung beberapa pemikiranjernih yang patut mendapat perhatian, bahkan juga dari para penentangannya.

Kaum elitis terkemuka selain Mosca adalah Vilfredo Pareto dan Robert Michels. Azas-azas umum yang sama-sama mereka anut adalah:

1. *Kekuasaan politik, seperti halnya barang-barang sosial didistribusikan dengan tidak merata.* Gagasan dasar dari Vilfredo Pareto ini sederhana tetapi meyakinkan, yaitu bahwa orang dapat di

²⁵ Robert D. Putnam, "Studi Perbandingan Elite Politik" dalam Mochtar Mas' oed dan Collin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1991. Hlm, 77

'rangking' berdasarkan pemilikan akan "barang" bewujud: kekayaan, kecakapan, atau kekuasaan politik.

2. *Pada hakekatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik "penting" dan mereka yang tidak memilikinya.* Kaum elitis klasik umumnya berpendapat bahwa distribus kekuasaan, hamper dalam segala hal, dapat dipandang dalam artian dikotomis itu.
3. *Secara internal, elite itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran-kelompok.* Elite itu bukan merupakan suatu kumpulan individu-individu yang saling terpisah, atau sekedar merupakan penjumlahan orang-orang saja. Tetapi sebaliknya, seperti halnya anggota-anggota klub khusus dan terbatas, individu-individu yang ada dalam kelompok elite itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip, dan memiliki nilai-nilai, kesetiaan, dan kepentingan yang sama. Untuk ini ada yang mengatakan kelompok elite itu memiliki "tiga K", yaitu kesadaran, keutuhan dan kebulatan tujuan kelompok.
4. *Elite itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat*

terbatas. Pemimpin-pemimpin selalu memilih sendiri penggantinya dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari beberapa orang.

5. *Kelompok elite itu pada hakekatnya bersifat otonom*. Kebal akan gugata dari siapapun diluar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok ini.

Inilah potret yang dilukiskan oleh para teoritisi elite klasik; suatu kasta kepemimpinan yang terisolir dari masyarakat, yang dengan lihai mendominasi massa yang lemah. Tetapi para teoritisi berbeda pendapat dalam hal mengapa masyarakat selalu terorganisir seperti itu. Beberapa teorisi, seperti Robert Michels, menegaskan bahwa adanya pembagian kerja yang diperlukan dalam setiap organisasi menyebabkan beberapa orang memperoleh kecakapan memimpin, sedang yang lain tidak memperoleh ini sehingga selalu menjadi obyek yang harus dipimpin, teoritisi yang lain, seperti Vilfredo Pareto, menyatakan bahwa oligarki timbul akibat ketidaksamaan kualitas pembawaan atau bakat pribadi, sehingga ada yang berhasil memimpin ada yang tetap menjadi sasaran kepemimpinan, dan beberapa teoritisi akhir-akhir ini, seperti Suzanne Keller, menyatakan bahwa penguasaan atau pemerintahan oleh elite merupakan syarat yang harus dipenuhi bila masyarakat ingin tetap terintegrasi.²⁶ Tetapi yang jelas

²⁶ Ibid. Hlm 79

semua teoritis itu setuju dengan ungkapan Michels bahwa oligarki adalah suatu hukum besi yang tak terelakkan.

Kerumitan empirik dari analisa elite sering ditambahi dengan adanya kecenderungan untuk mengacaukan masalah fakta sebagai masalah definisi. Misalnya banyak ahli ilmu sosial mendefinisikan "elite" dalam artian tiga-K dan menyebutkan sekumpulan proposisi-proposisi sebagai teori elite politik. Memang sedikit sekali kesepakatan yang ada diantara ahli-ahli ilmu sosial mengenai definisi elite, tetapi Robert D. Putnam mengusulkan pendefinisian itu secara luas, dengan mengesampingkan masalah-masalah besarnya, komposisinya, dan otonominya untuk penelitian empirik yang lebih lanjut. Menurut Robert D. Putnam memulai dengan dalil pertama dari teori klasik: bahwa beberapa orang memiliki lebih banyak kekuasaan politik disbanding dengan yang lain; dan mereka inilah yang disebut sebagai elite politik.²⁷

D. Definisi Konspional

1. Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah.

²⁷ Ibid. hlm 80

Bangsa dalam menghadapi pemilu 2009 ini ditengah konflik internal yang berulang hingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan konstituen terhadap partainya. Penelitian ini juga sebagai upaya memperkaya kajian studi ilmu politik secara empiris mengenai strategi suatu partai politik dalam menghadapi pemilu dengan kondisi internal partai yang tidak solid.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif (survei).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁸

Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok. Pada umumnya, yang merupakan unit analisa dalam penelitian survei adalah individu.²⁹ Namun dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah sebuah lembaga atau organisasi publik. Penelitian ini akan mengambil sampel dari individu yang

²⁸ Noh. Nazir, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 63

²⁹ Marsi Singgaribun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1998, hlm. 3

duduk sebagai pengurus organisasi, dengan asumsi bahwa mereka lebih aktif dan mengalami proses ideologisasi, sehingga dianggap cukup mewakili.

3. Jenis Data

Ada dua jenis data yang penulis gunakan, yaitu:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, berupa keterangan pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian melalui studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang tak terstruktur yang bisa secara leluasa ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin,³⁰ dengan beberapa tokoh tertentu misalnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah, Wakil Ketua Umum, atau Sekjend yang dianggap mewakili dan bisa memberikan informasi mendalam tentang obyek penelitian.

³⁰ Burhan Bungin (ed), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007. hlm. 67

b) Studi pustaka

Diambil dari buku, majalah, koran, artikel, website, dan lain-lain yang menyimpan sejumlah fakta dan data dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara serta pengamatan yang sudah dituliskan dalam sebuah dokumen-dokumen. Kemudian menyajikannya dengan bentuk abstraksi yang berisi rangkuman yang inti, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.